

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, STABILITAS
POLITIK, DAN PDRB TERHADAP KORUPSI DI
INDONESIA BAGIAN BARAT**

(Skripsi)

Oleh

Ingrid Yulika Oktarini

NPM 1541021003



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, STABILITAS
POLITIK, DAN PDRB TERHADAP KORUPSI DI
INDONESIA BAGIAN BARAT**

Oleh

Ingrid Yulika Oktarini

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL,
STABILITAS POLITIK, DAN PDRB
TERHADAP KORUPSI DI INDONESIA
BAGIAN BARAT**

Nama Mahasiswa : **Ingrid Yulika Oktarini**

Nomor Induk Mahasiswa : **1541021003**

Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1 003

MENGETAHUI

2. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Neli Aida, S.E., M.Si.
NIP 19631215 198903 2 002

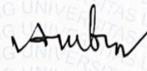
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

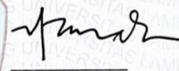
Ketua : Dr. Nairobi, S.E., M.Si.



Penguji I : Dr. Ambya, S.E., M.Si



Penguji II : Dr. Neli Aida, S.E., M.Si.



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Mei 2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 27 Juli 2022


Ingrid Yulika Oktarini

ABSTRAK

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, STABILITAS POLITIK, DAN PDRB TERHADAP KORUPSI DI INDONESIA BAGIAN BARAT

Oleh

INGRID YULIKA OKTARINI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal, stabilitas politik, dan pertumbuhan PDRB terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di 18 provinsi bagian barat Indonesia pada tahun 2015-2019. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan gabungan data *time series* dan *cross section*. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK), stabilitas politik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK), dan pertumbuhan PDRB berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di 18 provinsi bagian barat Indonesia pada tahun 2015-2019.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Stabilitas Politik, PDRB, Korupsi

ABSTRACT

THE EFFECT OF FISCAL DECENTRALIZATION, POLITICAL STABILITY, AND GRDP ON CORRUPTION IN THE WEST OF INDONESIA

By

INGRID YULIKA OKTARINI

This study aims to analyze and determine the effect of fiscal decentralization, political stability, and GRDP growth on the Corruption Perception Index (GPA) in 18 western provinces of Indonesia in 2015-2019. The data used in this study is a combination of time series and cross section data. This study uses secondary data sourced from *Badan Pusat Statistik* (BPS). This research uses panel data regression analysis method.

The results of this study indicate that; Fiscal decentralization has a negative and significant effect on the Corruption Perception Index (GPA), political stability has a negative and significant effect on the Corruption Perception Index (GPA), and GRDP growth has a positive but not significant impact on the Corruption Perception Index (GPA) in 18 provinces in western Indonesia in 2015-2019 years.

Keywords: Fiscal Decentralization, Political Stability, GRDP, Corruption

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ingrid Yulika Oktarini yang lahir di Lampung Selatan pada tanggal 15 Oktober 1998, merupakan anak bungsu dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Dirman Sugandi dan Ibu Mawan Hartini. Penulis mengawali pendidikan formal pada tahun 2003 di SDN 1 Bangun Sari yang diselesaikan pada tahun 2009. Penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Ar-raihan Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Ar-raihan Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis diterima di Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan melalui jalur paralel. Selama masa kuliah penulis mengikuti kegiatan organisasi kampus, sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA). Kemudian tahun 2017 Penulis mengikuti kegiatan KKL (Kuliah Kunjung Lapangan) di Bursa Efek Indonesia, Kementerian Perdagangan, Otoritas Jasa Keuangan. Penulis melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Way Isem, Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah, saya persembahkan skripsi ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kepada:

Kedua orang tuaku tercinta Bapak Alm Dirman Sugandi dan Ibu Mawan Hartini yang selalu mendukung, menyanyangi, mengasahi, serta memberikan motivasi tiada habisnya. Terima kasih untuk segala bentuk perjuangan yang penuh keikhlasan Ayah dan ibu berikan, untuk kesabaran, pengertian dan kepercayaan yang begitu besar dalam mendukung semua pencapaian penulis.

Terima kasih juga untuk kakak-kakaku Tata, Gustam, dan Nena yang selalu membimbing dan memberikan motivasi serta membantu apapun penulis butuhkan.

Almamaterku tercinta, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

MOTO

“What ever you decide to do, make sure it makes you happy”.

SANWACANA

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat serta nikmat-NYA sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Ekonomi Pembangunan. Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Stabilitas Politik, dan PDRB terhadap Korupsi di Indonesia Bagian Barat”**. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peranan serta bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, motivasi dan bimbingan selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung sekaligus dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh kesabaran serta, memberikan arahan, ilmu, dan saran kepada penulis hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
2. Ibu Dr. Neli Aida, S.E., M.Si selaku ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sekaligus dosen penguji yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan, masukan, motivasi, saran, nasihat, bantuan, hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan, masukan, motivasi, saran, nasihat, bantuan, hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Dr. Ambya, S.E., M.Si selaku dosen penguji yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan, masukan,

motivasi, saran, nasihat, bantuan, hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak Thomas Andrian, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran, masukan, motivasi, nasihat, serta bantuannya selama proses pendidikan penulis di Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu penulis selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
8. Kedua orang tuaku yang tercinta, Bapak Alm Dirman Sugandi dan Ibu Mawan Hartini yang telah memberikan cinta, kasih sayang, dukungan, semangat, doa, dan jerih lelah pengorbanan demi kesuksesan cita-citaku. Kupersembahkan Gelar ini untuk kalian sebagai tanggung jawabku atas segala pengorbanan yang telah diberikan.
9. Kakak-kakakku yang saya sayangi Tata Kurniawan, Gustam Effendi, Nena Marlina yang selalu memberikan doa, bantuan, dan dukungan dalam kehidupanku.
10. Teristimewa untuk Rangga Wiralabaika, yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan dalam proses penulisan skripsi. Terima kasih telah menghadirkan kebahagiaan dan sukacita dalam kehidupan penulis.
11. Suhu senior yang selalu membimbing skripsi dengan sabar serta meluangkan waktunya Yoel Christian dan Mita Gustiari.
12. Sahabat seperjuangan sedari maba (Rong-Rong) Axel J. K. L. T, Reza Fauzi, Gading Putra, Aji Mahendra, Mita Gustiari, Jesi Zafita Putri, Melinda Purnama Sari yang penuh drama dan suka duka.
13. Sahabat seperjuangan dalam kuliah (Reguler) Suci, Wafa, Bunga, dan Gebi
14. Sahabat seperjuangan dalam proses penyelesaian skripsi Aji Mahendra, Bunga Ratu, Jesi Zafita, Tri Puji, Gebrella Nadia dan yang tidak bisa saya sebutkan. Terimakasih untuk semua kenangan, cerita suka dan duka selama proses penulisan skripsi. Semoga perjuangan kita tidak sia-sia.

15. Sahabat SMA yang selalu berbagi canda dan tawa Ridho Pangestu, Moch Shandy, Bobby Novriandatama, Bunga Ratu, Fakhrotun nurul Azizah, Wica Ramadhanti, Aditya Falah, Muhammad Aditya N, Dimas Satrio, Sigit yudistira, dan Adjie Restu.
16. Para Keluarga Besar Himepa 2015/2016. Jajaran Presidium dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
17. Keluarga Besar EP 2015 dan juga teman-teman konsentrasi Perencanaan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai dengan skripsi ini terselesaikan. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Semoga segala dukungan, bimbingan, dan do'a yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Penulis

Ingrid Yulika Oktarini

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Korupsi.....	11
2.1.2 Teori Tingkat Korupsi.....	13
2.1.3 Desentralisasi	14
2.1.4 Stabilitas Politik	17
2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto.....	20
2.2 Penelitian Terdahulu	22
2.3 Kerangka Pemikiran.....	25
2.4 Hipotesis Penelitian	28
III. METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.2 Definisi dan Operasional Variabel.....	30
3.3 Wilayah Penelitian	32
3.4 Model dan Metode Analisis Data	32
3.4.1 Regresi Data Panel.....	32
3.4.2 Pemilihan Model Regresi Estimasi Data Panel	35
3.4.3 Pengujian Hipotesis	37
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Statistik Deskriptif	42
4.2 Uji Asumsi Klasik.....	42
4.3 Hasil Penelitian	44
4.3.1 Uji Signifikansi Model.....	44

4.3.2 Hasil Regresi.....	45
4.3.3 Pengujian Hipotesis Statistik	47
4.4 Pembahasan.....	48
4.5 Implikasi Kebijakan.....	53
V. SIMPULAN DAN SARAN.....	55
5.1 Simpulan	55
5.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57
DAFTAR LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Indeks Persepsi Korupsi (poin) di 18 Provinsi Bagian Barat Indonesia Periode 2015-2019	2
1.2 Penelitian Terdahulu	33
3.1 Deskripsi Data.....	37
3.2 Hasil Uji Chow	47
3.3 Hasil Uji Hausman.....	47
3.4 Hasil <i>Fixed Effect Model</i> (FEM).....	48
3.5 Hasil Uji-t.....	49
3.6 Hasil Uji-f	50
3.7 <i>Individual Effect</i>	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Indeks Desentralisasi di Provinsi Bagian Barat Indonesia (Persen).....	4
1.2 Indeks Demokrasi Indonesia di Indonesia Bagian Barat Tahun 2018-2019 (persen).	7
1.3 Laju Pertumbuhan PDRB di Provinsi-provinsi Indonesia Bagian Barat.....	9
2.1 Kerangka Teoritis.....	36

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 27 Juli 2022
Penulis

Ingrid Yulika Oktarini

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari masih saja membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Berita mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pelaku korupsi masih sering terjadi. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruption*. Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*. Berasal dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya) (WJS Poerwadarminta, 1982).

Korupsi merupakan fenomena yang masih memerlukan perhatian lebih karena merupakan kejahatan luar biasa yang dampaknya sangat merugikan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Menurut *Corruption Perception Index* (CPI) pada tahun 2013 Indonesia berada pada urutan 114 dari 177 negara yang disurvei, dan memperoleh skor 32. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) adalah anggapan publik atau masyarakat terhadap korupsi pada jabatan publik dan politis. Skor CPI berada diantara 0 sampai dengan 100. Skor 0 menunjukkan bahwa suatu negara sangat korup, sedangkan skor 100 menunjukkan bahwa suatu negara sangat bersih. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, dengan demikian pemerintah

harus menangani masalah tersebut secara serius. Rata-rata Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia bagian barat pada tahun 2019 adalah 55,14 poin sedangkan rata-rata IPK di Indonesia bagian timur pada tahun 2019 adalah 72,21 poin. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia bagian barat lebih tinggi dibandingkan Indonesia bagian timur. Hal ini terjadi karena adanya pemusatan pemerintahan berada pada Indonesia bagian barat dimana permasalahan korupsi banyak terjadi disana (Saputra, 2020). Berikut adalah rincian Indeks Persepsi Korupsi di bagian barat dan timur Indonesia berdasarkan provinsi pada tahun 2015-2019:

Tabel 1.1 Indeks Persepsi Korupsi (poin) di 18 Provinsi Bagian Barat Indonesia Periode 2015-2019

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	50.1	50.3	51.1	50.9	51.2
Sumatera Utara	34.8	34.9	35.2	33.6	35.1
Sumatera Barat	53.2	53.2	53.6	53.4	54.1
Riau	34.7	41.5	65.5	66.2	60.1
Kep. Riau	32.2	34.7	46.7	53.2	32.1
Kep. Bangka Belitung	67.9	64.2	64.9	61.3	65.2
Jambi	57.7	60.3	62.8	61.4	62.1
Bengkulu	67.4	68.9	64.2	66.9	65.1
Sumatera Selatan	45.1	34.1	46.2	40.2	47.8
Lampung	53.9	52.6	50.4	55.1	60.7
Banten	42.7	43.2	46.7	51.2	52.9
DKI Jakarta	30.1	39.2	33.3	31.8	37.1
Jawa Barat	39.6	47.8	58.1	60.3	50.2
Jawa Tengah	59	66.6	58.7	60.1	69.1
Yogyakarta	54.2	53.4	62.3	65.1	60.6
Jawa Timur	64.7	70	61.2	63.1	64.2
Kalimantan Barat	56.4	63.2	65	66.7	64.8
Kalimantan Tengah	60.1	66.2	65.1	65.3	60.2

Sumber: ACLC (Anti-Corruption Learning Center) KPK RI

Tabel 1.2 Indeks Persepsi Korupsi (poin) di 18 Provinsi Bagian Timur Indonesia Periode 2015-2019

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019
Nusa Tenggara Barat	65.34	64.51	66.51	64.25	70.56
Nusa Tenggara Timur	61.20	74.25	63.80	73.41	70.52
Kalimantan Selatan	64.67	63.67	69.50	74.60	71.12
Kalimantan Timur	66.16	71.11	75.20	66.99	71.76
Kalimantan Utara	66.61	64.73	69.83	65.17	69.99
Sulawesi Utara	68.03	65.08	71.60	67.13	68.68
Sulawesi Tengah	63.70	60.27	68.10	63.59	69.88
Sulawesi Selatan	69.26	66.09	70.32	55.33	68.22
Sulawesi Tenggara	62.19	65.52	69.89	63.90	70.04
Gorontalo	66.72	65.66	67.03	63.94	74.50
Sulawesi Barat	61.43	65.44	64.29	73.04	79.86
Maluku	68.41	64.87	68.20	78.28	70.64
Maluku Utara	66.71	66.27	67.12	55.04	70.50
Papua Barat	63.69	73.74	63.11	76.68	78.74
Papua	67.59	62.67	58.93	63.60	70.15

Sumber: ACLC (Anti-Corruption Learning Center) KPK RI

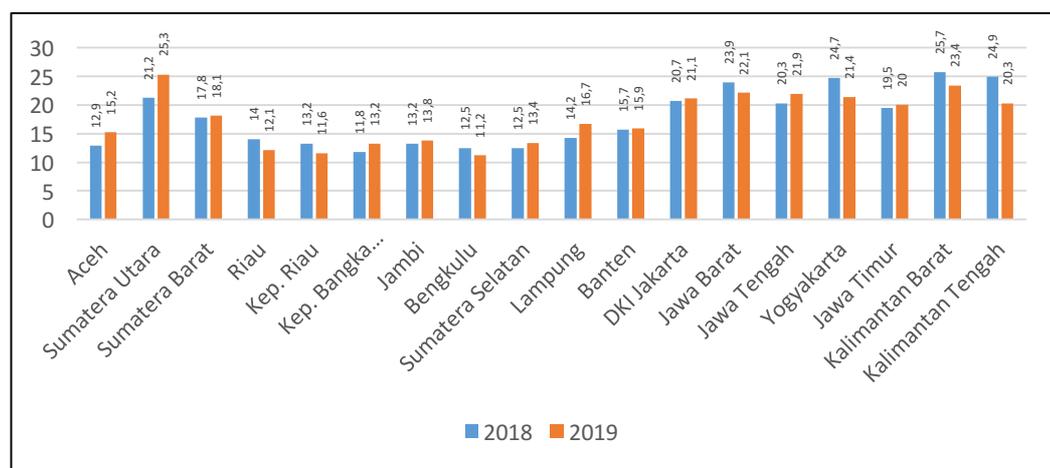
Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 menunjukkan perkembangan tingkat korupsi di Indonesia bagian barat dan timur selama 5 tahun terakhir. Secara keseluruhan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di 18 provinsi bagian barat Indonesia lebih kecil dibandingkan dengan IPK di bagian timur Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi di bagian barat Indonesia lebih besar dibandingkan bagian timur Indonesia. Menurut Saputra (2020) penyebab besarnya persepsi korupsi di bagian barat Indonesia adalah masyarakat menganggap bahwa bagian barat Indonesia merupakan pusat pemerintahan dimana segala aktivitas keuangan dan kenegaraan dapat menjadi potensi untuk melakukan kejahatan korupsi.

Pada tahun 2019 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang terendah adalah Provinsi Riau dengan indeks sebesar 32,1. Hal ini mengindikasikan bahwa Provinsi Riau mempunyai tingkat korupsi tertinggi diantara provinsi di bagian barat Indonesia. Menurut *Indonesia Corruption Watch* (2020), pada tahun 2019 Riau mempunyai total jumlah laporan kasus korupsi sebanyak 2.787 kasus. Kasus korupsi disektor

kehutanan merupakan kasus terbesar dengan dugaan kerugian negara sebesar 1,2 triliun.

Semakin meningkatnya korupsi di Indonesia pada tingkat daerah disebabkan oleh gagalnya sistem desentralisasi yang ditandai dengan yang dikarenakan lemahnya akuntabilitas maupun *checks and balances*. Faktanya banyak pejabat yang cenderung menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang untuk kepentingan diri sendiri maupun kalangan kelompok tertentu yang dapat disebut dengan korupsi. Menurut *Transparency International* (TI), yang disebut dengan korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Desentralisasi adalah suatu proses penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang terpilih atau kepada daerah otonom. Dengan diberlakukannya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyediaan barang publik kepada masyarakat menurut Oates (2005) serta dengan adanya desentralisasi dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pemerintahan (Seabright dalam Oates, 2005). Berikut adalah indeks desentralisasi di bagian barat Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan 2019:



Sumber: Badan Pusat Statistika, 2021

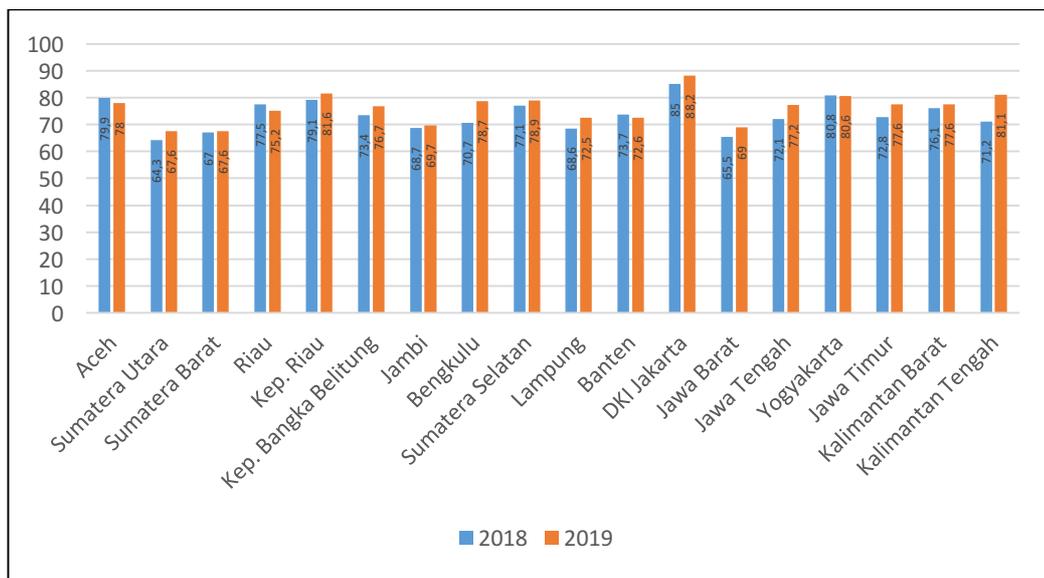
Gambar 1.1 Indeks Desentralisasi di Provinsi Bagian Barat Indonesia (Persen)

Gambar 1.1 merupakan gambar yang merepresentasikan Indeks Desentralisasi di provinsi-provinsi bagian barat Indonesia pada tahun 2018-2019. Indeks desentralisasi menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah terhadap pemerintahan pusat. Pada tahun 2019 provinsi dengan indeks desentralisasi terbesar berada pada provinsi Sumatera Utara dengan indeks sebesar 25,8. Sedangkan provinsi dengan indeks desentralisasi terendah berada pada provinsi Bengkulu dengan indeks sebesar 11,2.

Pada negara berkembang khususnya negara Indonesia, dimana Indonesia sudah menjalankan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sejak tahun 2000 yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, dan kemudian mengalami pembaruan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Diharapkan pemerintah daerah mampu menyediakan barang publik secara efektif dan efisien. Namun sejalan dengan Prud'homme (1995) dan Tanzi (1996) dimana desentralisasi tidak sesuai apabila diimplementasikan di negara berkembang, sistem desentralisasi di Indonesia tidak berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan. Persoalan lain muncul ketika stabilitas politik di daerah tidak cukup signifikan berjalan yang kemudian berpengaruh pada penerapan desentralisasi fiskal yang tidak sinergi. Hal inipun kemudian berimplikasi pada persoalan-persoalan lanjutan yang berdampak pada jalannya pemerintahan dan tentu saja jalannya desentralisasi fiskal itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Fisman dan Gatti (2002) menemukan bahwa desentralisasi fiskal dalam pengeluaran pemerintah secara signifikan sangat terkait dengan korupsi yang lebih rendah (hubungan negatif) di seluruh sampel dari 55 negara. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Gurgur dan Shah (2005) menemukan desentralisasi memiliki dampak negatif pada korupsi, dimana desentralisasi diukur sebagai rasio kerja di non-pusat administrasi pemerintahan dengan pekerjaan umum pemerintah sipil, dan korupsi diukur dengan indeks persepsi korupsi dari *Transparency International*.

Faktor lain yang dianggap sebagai penyebab tingginya tingkat korupsi adalah stabilitas politik. Penelitian yang dilakukan oleh Aleksandra (2000) menemukan bahwa stabilitas merupakan prasyarat penting untuk mitigasi korupsi yang sukses. Kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil memungkinkan pemerintah dan warga negara untuk mempromosikan mekanisme transparan pemantauan korupsi, *assesment* dan *control* terhadap korupsi. Korupsi semakin memburuk di negara-negara di Eropa Tenggara yang mengalami transisi politik. Sering kali, transisi ini disertai dengan ketidakstabilan politik, ekonomi dan sosial. Ketidakstabilan ini dapat membuat korupsi satu-satunya pilihan yang tersedia untuk warga negara, termasuk pejabat pemerintah, untuk bertahan hidup. Membaca dari penelitian ini, stabilitas politik dapat memiliki hubungan yang positif dengan pengendalian korupsi. Berikut adalah gambaran dari indeks stabilitas politik yang direpresentasikan dari Indeks Demokrasi Indonesia di Indonesia bagian barat pada tahun 2018-2019:



Sumber: Badan Pusat Statistika, 2021

Gambar 1.2 Indeks Demokrasi Indonesia di Indonesia Bagian Barat Tahun 2018-2019 (persen).

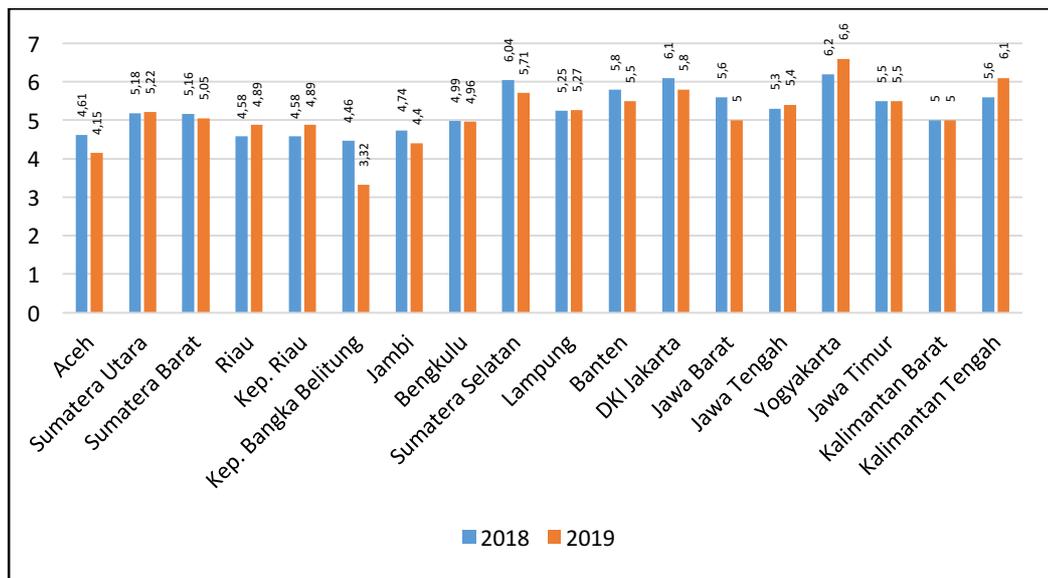
Pada gambar di atas merepresentasikan indeks stabilitas politik yang diproksikan dari Indeks Demokrasi Indonesia. Pada penelitian ini variabel indeks stabilitas politik diproksikan dengan IDI karena adanya keterbatasan data dari indeks

stabilitas politik di Indonesia. Pada tahun 2019, provinsi dengan IDI terbesar berada pada provinsi DKI Jakarta dengan indeks sebesar 88,2. Sedangkan, provinsi dengan IDI terendah berada pada Provinsi Sumatera Barat dengan nilai sebesar 67,6. Menurut BPS (2010), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi. IDI sendiri mempunyai 3 kategori yaitu baik (indeks > 80), sedang (indeks 60-80), dan buruk (indeks < 60).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hariyani dkk (2016), menemukan bahwa IDI berhubungan negatif dengan CPI di Kawasan Asia Pasifik. Demokrasi di satu sisi pemilihan kompetitif cenderung mengurangi korupsi aktor lama yang korup dan memilih keluar dari pemilihan. Di sisi lain, kebutuhan untuk membiayai kampanye politik dapat menyebabkan politisi memperdagangkan keputusan politik untuk pendanaan. Pada penelitiannya menemukan bahwa kecenderungan meningkatnya IDI merepresentasikan adanya keterlibatan seseorang dalam jabatan politik semakin besar, hal ini akan dimanfaatkan oknum atau beberapa orang untuk melakukan tindak korupsi yang akan semakin membuat CPI semakin kecil yang menunjukkan tingkat korupsi semakin besar.

Pada perspektif hubungan korupsi dan pertumbuhan ekonomi, para ekonom, sejarawan dan ahli politik telah terlibat dalam perdebatan panjang tentang apakah korupsi membahayakan pertumbuhan ekonomi. Pandangan umum menyatakan bahwa korupsi dapat mendistorsi alokasi sumberdaya yang efisien dalam perekonomian. Sebagian besar ekonom memandang bahwa korupsi menjadi penghambat utama pembangunan ekonomi. Menurut Blackburn *et al.* (2006), korupsi merupakan salah satu penyebab pendapatan rendah dan memainkan peran penting dalam menimbulkan jebakan kemiskinan. Namun, beberapa orang menganggap bahwa korupsi digunakan sebagai *oiling the wheel* untuk birokrasi, terkadang korupsi juga dapat bermanfaat bagi perekonomian (Huntington, 1968; Lui, 1985). Sebaliknya, Tanzi (1998) mengklaim bahwa korupsi dapat menimbulkan biaya birokrasi yang besar.

Begitu juga hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan korupsi, banyak ahli yang mengatakan adanya hubungan erat antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat korupsi. Menurut Sukirno (2011) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode. Berikut adalah perkembangan pertumbuhan ekonomi yang diukur dari laju pertumbuhan PDRB:



Sumber: Badan Pusat Statistika, 2021

Gambar 1.3 Laju Pertumbuhan PDRB di Provinsi-provinsi Indonesia Bagian Barat (Persen).

Pada gambar di atas menggambarkan laju pertumbuhan PDRB sebagai representasi dari pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi Indonesia bagian barat. Laju pertumbuhan PDRB terbesar tahun 2019 berada pada provinsi Yogyakarta dengan nilai sebesar 6,6%. Sedangkan nilai laju pertumbuhan PDRB terendah berada pada provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai sebesar 3,32%.

Penelitian yang dilakukan oleh Hariyani dkk (2016) menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan tindak pidana korupsi di Asia Pasifik. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merepresentasikan pendapatan dari daerah tersebut semakin baik. Keadaan ini akan

dimanfaatkan oleh segelintir individu ataupun kelompok untuk melakukan tindak pidana korupsi melalui berbagai cara yang ada.

Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak *legitimate* di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut, akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, *money politics* dan lain-lain juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan (otoriter) atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat. Di samping itu, keadaan yang demikian itu akan memicu terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial, karena terjadi pertentangan antara penguasa dan rakyat. Bahkan dalam banyak kasus, hal ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintahan secara tidak terhormat, seperti yang terjadi di Indonesia (Robin Theobald, 1990).

Secara ekonomi keberadaan korupsi akan mengganggu mekanisme transmisi pendapatan dan kekayaan, sehingga timbulnya korupsi akan menyebabkan timbulnya kesenjangan pendapatan. Mauro (2004) menunjukkan bahwa korupsi berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi dan merusak investasi yang ada. Artinya jika korupsi meningkat maka investasi domestik dan investasi asing akan terganggu serta pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan. Tingginya tingkat korupsi akan menurunkan besarnya pengeluaran pemerintah terutama di bidang jaminan sosial dan pembayaran kesejahteraan publik (*social security and welfare payments*).

Toke Aidt, Jayasri Dutta dan Vania Sena (2008) menyatakan bahwa peran dari akuntabilitas politik sebagai penentu hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi. Jika lembaga politik memiliki kualitas yang baik, korupsi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika lembaga politik tersebut kualitasnya rendah maka korupsi tidak berdampak pada pertumbuhan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap korupsi yang diukur dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia?
2. Bagaimana stabilitas politik terhadap korupsi yang diukur dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan PDRB terhadap korupsi yang diukur dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal, stabilitas politik, dan pertumbuhan PDRB secara bersama-sama terhadap korupsi yang diukur dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap korupsi yang diukur dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah stabilitas politik berpengaruh terhadap korupsi yang diukur dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia.
3. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan PDRB berpengaruh terhadap korupsi yang diukur dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia.
4. Untuk mengetahui apakah desentralisasi fiskal, stabilitas politik, dan pertumbuhan PDRB secara bersama-sama berpengaruh terhadap korupsi yang diukur dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi penting terkait korupsi yang diukur dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diberbagai wilayah di Indonesia.
3. Memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait pengaruh beberapa variabel penyebab tindak pidana korupsi khususnya dalam bidang ekonomi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Korupsi

Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi kondisiyang sebaliknya. *Corruptio* dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, ataudisuap. Melihat dari definisi tersebut jelas bahwa korupsi tidak hanya menyangkut aspek hukum, ekonomi, dan politik, tetapi juga menyangkut perilaku manusia (*behavior*) serta norma (*norms*) yang diterima dan dianut masyarakat. Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi.

Menurut Kamus Lengkap *Oxford (The Oxford Unabridged Dictionary)*, korupsi didefinisikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuaipan atau balas jasa. Menurut *World Bank*, korupsi didefinisikan “*the abuse of public power for private benefit*”, penyalahgunaan kekuatan publik untuk kepentingan pribadi. Keuntungan pribadi diartikan bukan hanya kepada seseorang, tetapi juga kepada suatu partai politik, suatu kelompok tertentu dalam masyarakat, suku, teman atau keluarga. Definisi ini juga serupa dengan yang dipergunakan oleh *Transparency International (TI)*, yaitu korupsi melibatkan perilaku oleh pegawai di sektor publik, baik politikus atau pegawai negeri, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri, atau yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dengan melihat beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi secara implisit adalah

menyalahgunakan kewenangan, jabatan, atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut juga terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi. Pertama, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. Kedua, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. Ketiga, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada padadirinya. Keempat, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi, atau lembaga instansi tertentu. Kelima, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara.

Menurut Stueckelberger (2002) bentuk dan motif korupsi dapat berbeda-beda, yaitu dijelaskan sebagai berikut:

- a. Korupsi kemiskinan (*corruption of poverty*), umumnya disebut korupsi kecil (*petty corruption*), yaitu berakar dalam kemiskinan. Sebagai contoh jika pegawai-pegawai pemerintah tidak menerima gaji atau gajinya tidak mencukupi untuk kehidupan.
- b. Korupsi kekuasaan (*corruption of power*), umumnya disebut korupsi besar (*grand corruption*), yaitu berakar dari adanya nafsu untuk memiliki lebih banyak kekuasaan, pengaruh, dan kesejahteraan atau dalam mempertahankan kekuasaan dan posisi ekonomi yang telah dimiliki.
- c. Korupsi untuk mendapatkan sesuatu (*corruption of procurement*) dan korupsi untuk mempercepat urusan (*corruption of acceleration*), dimaksudkan untuk mendapat barang atau pelayanan yang jika tanpa korupsi tidak bisa diperoleh atau tidak tepat waktu atau hanya dengan biaya administratif yang lebih besar.

Menurut Aditjondro (2003) secara aplikatif ada tiga model lapisan korupsi, yaitu:

- a. Korupsi Lapis Pertama

Penyuapan (*bribery*), yaitu dimana prakarsa datang dari pengusaha atau wargayang membutuhkan jasa dari birokrat atau petugas pelayanan publik, atau pembatalan kewajiban membayar denda ke kas negara, pemerasan (*extortion*)

dimana prakarsa untuk meminta balas jasa datang dari birokrat atau petugaspelayanan publik lainnya.

b. Korupsi Lapis Kedua

Jejaring korupsi (*cabal*) antara birokrat, politisi, aparat penegakan hukum dan perusahaan yang mendapat kedudukan yang istimewa. Biasanya ada ikatan yang nepotistis diantara beberapa anggota jejaring korupsi yang dapat berlingkup nasional.

c. Korupsi Lapis Ketiga

Jejaring korupsi (*cabal*) berlingkup internasional, dimana kedudukan aparat penegakan hukum dalam model korupsi lapis kedua digantikan oleh lembaga-lembaga penghutang dan atau lembaga internasional yang punya otoritas dibidang usaha maskapai-maskapai mancanegara yang produknya terpilih oleh pimpinan rezim yang jadi anggota jejaring korupsi internasional tersebut. Korupsi cenderung mengalihkan pengeluaran pemerintah dari wilayah sosial menuju pembangunan proyek yang tidak dibutuhkan atau investasi dengan kualitas yang lebih rendah di bidang infrastruktur. Di negara-negara yang palingkorup, politisi korup cenderung memilih proyek investasi bukan berdasarkan basisekonomi intrinsik mereka, namun pada kesempatan untuk suap dan suap proyekini hadir. Korupsi dapat mempengaruhi pembentukan modal manusia, yang merupakan input terpenting dalam proses produksi dan tranformasi yang disebut pembangunan ekonomi

2.1.2 Teori Tingkat Korupsi

Perilaku korupsi seperti penyuapan dan politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Beberapa teori yang dapat menjelaskan bagaimana korupsi dapat terjadi yaitu sebagai berikut:

- a. Teori Means-Ends Scheme Robert, teori ini dikemukakan oleh Robert Merton yang menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma.
- b. Teori Vroom, teori ini dikemukakan oleh Victor H, Vroom yang menyatakan bahwa korupsi merupakan nilai negatif dari harapan seseorang untuk mencapai

sesuatu. Teori ini memandang bahwa motivasi seseorang melakukan sesuatu dipengaruhi oleh harapan dan nilai yang terkandung dalam setiap pribadi seseorang.

- c. Teori Robert Klitgaard, teori ini menyatakan bahwa monopoli kekuatan oleh pimpinan (*monopoly of power*) ditambah dengan tingginya kekuasaan yang dimiliki seseorang (*discretion of official*) tanpa adanya pengawasan yang memadai dari aparat pengawas (*minus accountability*), menyebabkan dorongan melakukan tindak pidana korupsi.
- d. Teori Gane, teori ini dikemukakan oleh Jack Bologne. Ilustrasi teori ini terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi keserakahan (*greeds*), kesempatan (*opportunities*), kebutuhan (*needs*), dan pengungkapan (*exposure*).

2.1.3 Desentralisasi

Desentralisasi merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi akan diwujudkan dengan memberikan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*), terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, kepala daerah yang dipilih oleh rakyat, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat (Bird dan Vaillancourt 1998).

Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Menurut Prawirosetoto (Pujiati 2006), desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*). Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik (*public goods / public service*). Dengan kata lain, desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari

tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintah yang dilimpahkan (Saragih 2003).

Pemerintah daerah diberikan sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya. Daerah diberikan kewenangan dalam menggali sumber-sumber penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Prinsip dari desentralisasi fiskal tersebut adalah *money follow functions*, dimana Pemerintah Daerah mendapat kewenangan dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan di daerahnya. Pemerintah Pusat memberikan dukungan dengan menyerahkan sumber-sumber penerimaan kepada daerah untuk dikelola secara optimal agar mampu membiayai daerahnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pemerintah Pusat juga memberikan dana transfer yang dapat dikelola daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuannya adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal dengan Pemerintah Pusat dan antar Pemerintah Daerah lainnya. Untuk meminimalkan ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat melalui dana transfer tersebut, daerah dituntut dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam menggali potensi pendapatannya.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi, karena apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya dan diberikan kebebasan dalam mengambil keputusan di sektor publik, maka harus mendapat dukungan dari pemerintah pusat berupa subsidi/bantuan maupun pinjaman dari pemerintah pusat serta sumber-sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk *surcharge of taxes*, pinjaman, maupun dana perimbangan dari pemerintah pusat. Pemerintah pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama, antara lain fungsi distribusi, alokasi dan stabilisasi (Stiglitz 2000).

Fungsi alokasi adalah peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi agar tercipta secara efisien, yaitu peran pemerintah dalam menyediakan barang yang tidak bisa disediakan oleh pasar. Fungsi distribusi adalah peran pemerintah dalam memengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin adanya keadilan dalam mengatur distribusi pendapatan. Fungsi stabilisasi merujuk pada tindakan pemerintah dalam memengaruhi keseluruhan tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan harga. Dalam hal ini pemerintah menggunakan kebijakan anggaran untuk mengurangi pengangguran, kestabilan harga dan tingkat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal menurut Halim (2007) akan berjalan dengan baik dengan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya Pemerintah Pusat yang kapabel dalam melakukan pengawasan dan *enforcement*.
- b. Terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah.
- c. Stabilitas politik yang kondusif.
- d. Proses pengambilan keputusan di daerah harus demokratis, dimana pengambilan keputusan tentang manfaat dan biaya harus transparan serta pihak-pihak yang terkait memiliki kesempatan memengaruhi keputusan keputusan tersebut.
- e. Desain kebijakan keputusan yang diambil sepenuhnya merupakan tanggung jawab masyarakat setempat dengan dukungan institusi dan kapasitas manajerial yang diinginkan sesuai dengan permintaan pemerintah
- f. Kualitas sumberdaya manusia yang kapabel dalam menggantikan peran sebelumnya yang merupakan peran pemerintah pusat.

2.1.4 Stabilitas Politik

Pendekatan ekonomi politik secara definitif dimaknai sebagai interrelasi diantara aspek, proses, dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi yaitu produksi, investasi, penciptaan harga, perdagangan, konsumsi, dan lain sebagainya (Caporaso dan Levine, 1992). Mengacu pada definisi tersebut, pendekatan ekonomi politik mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik, baik yang menyangkut aspek, proses,

maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang diintrodusir oleh pemerintah. Harus juga dipahami bahwa pendekatan ini meletakkan bidang politik subordinat terhadap ekonomi. Artinya, instrumen-instrumen ekonomi seperti mekanisme pasar (*market mechanism*), harga, dan investasi dianalisis dengan mempergunakan *setting* sistem politik di mana kebijakan atau peristiwa ekonomi tersebut terjadi. Dengan kata lain, pendekatan ini melihat ekonomi sebagai cara untuk melakukan tindakan (*a way of acting*), sedangkan politik menyediakan ruang bagi tindakan tersebut (*a place to act*). Singkatnya, antara ilmu ekonomi (*economic*) dan ilmu politik (*politics*) memang berlainan, dalam pengertian diantara keduanya mempunyai alat analisis sendiri-sendiri yang bahkan memiliki asumsi yang berlawanan (Caporaso dan Levine, 1992).

Tidak mungkin menggabungkan alat analisis ekonomi dan politik karena bisa sangat ambigu dan membingungkan. Sungguh pun begitu, antara ekonomi dan politik bisa disandingkan dengan pertimbangan keduanya mempunyai proses yang sama. Setidaknya, keduanya memiliki perhatian yang sama terhadap isu-isu seperti mengorganisasi dan mengkoordinasi kegiatan manusia, mengelola konflik, mengalokasikan beban dan keuntungan, dan menyediakan kepuasan bagi kebutuhan dan keinginan manusia (Clark, 1998).

Berdasarkan pemahaman ini, pendekatan ekonomi politik mempertemukan antara bidang ekonomi dan politik dalam hal alokasi sumberdaya ekonomi dan politik (yang terbatas) untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi dari kebijakan ekonomi politik selalu mempertimbangkan struktur kekuasaan dan sosial yang hidup dalam masyarakat, khususnya target masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.

Pendekatan ekonomi politik semakin relevan untuk dipakai karena struktur ekonomi sendiri tidak semata-mata ditentukan secara teknis. Pendekatan ekonomi politik terdiri dari dua bagian yang saling terkait. Pertama, kekuatan produksi material pabrik dan perlengkapan (atau modal), sumber-sumber alam (disebut tanah oleh para ekonom klasik), manusia dengan kemampuan yang ada (atau tenaga

kerja), dan teknologi. Teknologi menentukan hubungan produksi yang sifatnya teknis, sehingga proporsi bahan mentah, mesin, dan tenaga kerja bisa dialokasikan dengan biaya yang paling minimal. Kedua, relasi produksi-manusia, seperti hubungan antarpara pekerja dan pemilik modal atau antara para pekerja dan manajer (Zimbalis etal, 1989).

Pada pendekatan ekonomi politik ini, setidaknya terdapat lima hal yang memperkuat pemakaiannya. Pertama, penggunaan kerangka kerja ekonomi politik berupaya untuk menerima eksistensi dan validitas dari perbedaan budaya politik, baik formal maupun informal. Kedua, analisis kebijakan akan memperkuat efektivitas sebuah rekomendasi karena mencegah pemikiran yang deterministik. Ketiga, analisis kebijakan mencegah pengambilan kesimpulan terhadap beberapa alternatif tindakan berdasarkan kepada perspektif waktu yang sempit. Keempat, analisis kebijakan yang berfokus ke negara berkembang tidak bisa mengadopsi secara penuh orientasi teoritis statis (*static theoretical orientation*). Kelima, analisis kebijakan lebih mampu menjelaskan interaksi antarmanusia (Rotchild dan Curry, 1978). Dengan beberapa relevansi tersebut, pendekatan ekonomi politik dipandang lebih mampu menangkap kondisi riil yang hidup di masyarakat. Bahkan, dengan pendekatan ini pula, bisa dimengerti mengapa satu kelompok masyarakat menolak suatu kebijakan, sementara kelompok masyarakat yang lain justru mendukungnya (Yustika, 2008).

Aleksandra (2000) menemukan bahwa stabilitas merupakan prasyarat penting untuk mitigasi korupsi yang sukses. Kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil memungkinkan pemerintah dan warga negara untuk mempromosikan mekanisme transparan dalam pemantauan, penilaian dan pengendalian korupsi.

Aleksandra (2000) juga menunjukkan bahwa korupsi merajalela di negaranegara di Eropa Tenggara yang mengalami transisi politik. Sering kali transisi ini disertai dengan ketidakstabilan politik, ekonomi dan sosial. Ketidakstabilan ini dapat membuat korupsi menjadi satu-satunya pilihan yang tersedia untuk warga negara, termasuk pejabat pemerintah untuk bertahan hidup. Berdasarkan penelitian

tersebut, stabilitas politik dapat memiliki hubungan yang negatif dengan tingkat korupsi.

2.1.5 *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)*

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu unsur penentu utama dalam proses pembangunan daerah dan mempunyai implikasi kebijakan yang cukup luas. Sasaran utama pertumbuhan ekonomi adalah menjelaskan mengapa suatu daerah dapat tumbuh cepat dan ada pula yang tumbuh lambat, pertumbuhan ekonomi juga menjelaskan bagaimana hubungan antara pembangunan ekonomi nasional dan ketimpangan antar daerah (Sjafrizal, 2018).

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP (*Gross Domestic Product*) tanpa memandang bahwa kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan tanpa memandang apakah ada perubahan dalam struktur ekonominya (Suryana, 2000).

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dari kenaikan output perkapita dalam jangka waktu yang panjang. Pertumbuhan ekonomi disini meliputi 3 aspek yaitu (Boediono, 1992):

1. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses (aspek ekonomis)
2. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan adanya kenaikan output perkapita, dalam hal ini ada 2 aspek penting yaitu output total dan jumlah penduduk. Output perkapita adalah output total dibagi jumlah penduduk.
3. Pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan perspektif waktu jangka panjang. Dikatakan tumbuh bila dalam jangka panjang waktu yang cukup lama (5tahun) mengalami kenaikan output. Perekonomian berkembang, berubah dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan ekonomi seringkali menjadi fokus utama dalam penataan pemerintahan. Sebab, aspek ekonomi ini pula yang menjadi tolok ukur utama kesejahteraan rakyat. Tentunya, kesejahteraan rakyat ini menjadi salah satu tujuan utama dari pencapaian kepentingan nasional. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Tujuan yang paling penting dari

suatu pembangunan adalah pengurangan tingkat kemiskinan yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomidan/atau melalui redistribusi pendapatan. Hal ini dilandasi pada teori *trickle-down effect* (Arthur Lewis, 1954).

a. Teori Pertumbuhan Klasik

Teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan John Stuart Mill. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh empat faktor yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, faktor luas tanah, kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Pertumbuhan ekonomi tergantung pada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi klasik terutama menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Apabila terdapat kekurangan penduduk dan kekayaan alam yang relative berlebihan, maka tingkat pengembalian modal dari investasi semakin tinggi dan para investor semakin banyak mengalami keuntungan, sehingga menimbulkan investasi baru serta pertumbuhan ekonomi akan terwujud. Apabila jumlah penduduk sudah terlalu banyak, pertambahannya akan menurunkan tingkat negative, sehingga kemakmuran masyarakat akan menurun (Sukirno, 2004)

Menurut Adam Smith dalam bukunya "*An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations*" (1776), mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis. Terdapat dua aspek utama dalam pertumbuhan ekonomi. Pertama, pertumbuhan output total (GDP) dan Pertumbuhan penduduk. Dalam pertumbuhan output, Adam Smith melihat sistem produksi suatu negara terdiri dari tiga unsure pokok, yaitu:

1. Sumber daya alam yang merupakan wadah paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat dimana jumlah sumber daya alam yang tersedia mempunyai batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian.
2. Sumber daya manusia (jumlah penduduk) merupakan peran pasif dalam proses pertumbuhan output, maksudnya jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja.
3. Stok modal merupakan unsur produksi yang sangat menentukan tingkat pertumbuhan output. Laju pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi faktor-

faktor produksinya. Produktivitas dapat ditingkatkan melalui beberapa sarana pendidikan pelatihan dan manajemen yang lebih baik.

b. Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik

Teori pertumbuhan neo klasik dikembangkan oleh Robert M. Sollow dan T. W. Swan merupakan penyempurnaan teori klasik sebelumnya. Model Sollow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi (Tarigan, 2014). Pandangan ini didasarkan pada analisis klasik, bahwa perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (*full employment*) dan kapasitas peralatan modal akan digunakan sepenuhnya sepanjang waktu.

Menurut teori neo-klasik pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi, tenaga kerja, akumulasi modal dan tingkat kemajuan teknologi (Arsyad, 2010). Analisis teori ini didasarkan atau asumsi-asumsi dari teori klasik yaitu bahwa perekonomian berada pada tingkat pekerjaan penuh (*full employment*) dan tingkat penggunaan penuh (*full utilization*) dari faktor-faktor produksinya. Model ini menjelaskan bahwa teknologi yang digunakan menentukan besarnya output yang diproduksi dari jumlah modal dan tenaga kerja tertentu. Teori pertumbuhan neo klasik yang disajikan dalam fungsi Cobb-Douglas menekankan peranan modal, tenaga serta teknologi sebagai faktor produksi. Menurut Sollow, pertumbuhan penduduk dan ada teknologi, walaupun teknologi masih dianggap sebagai faktor eksogen. demikian fungsi produksi dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = F(K, L, X E)$$

Dimana E merupakan variabel yang disebut efisiensi tenaga kerja. $L \times E$ mengukur jumlah para pekerja efektif yang memperhitungkan jumlah pekerja L dan efisiensi masing-masing pekerja. Fungsi produksi ini menyatakan bahwa output total Y bergantung pada jumlah modal unit K dan jumlah para pekerja efektif $L \times E$. ini bermakna bahwa peningkatan efisiensi tenaga kerja E sejalan dengan peningkatan angkatan kerja L (Mankiw, 2000). Dalam model ini akan

mendorong pertumbuhan ekonomi untuk sementara, akan tetapi pengembalian modal yang kian mendorong pencapaian perekonomian yang mapan akan tergantung pada kemajuan teknologi.

Desentralisasi dan Korupsi

Desentralisasi bisa meningkatkan kualitas pemerintahan dengan berbagai jalan (Kyriacou dan Sagales, 2008). Ketika fiskal di desentralisasikan dengan menetapkan kewenangan yang sifatnya fleksibel dan penuh kompetisi maka diharapkan pemda mampu menyediakan barang publik dengan efisien atau lebih responsive terhadap permintaan dan dengan biaya rendah serta juga menciptakan tingkat korupsi yang lebih rendah di daerah.

Dengan adanya desentralisasi maka tata kelola akan lebih baik yang ditunjukkan dengan peningkatan kualitas pemerintahan yang diukur dengan partisipasi masyarakat, akuntabilitas politik dan birokrasi, keadilan sosial, dan meningkatkan manajemen ekonomi dan mengurangi korupsi. Kemajuan ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Huther dan Shah (1998).

Konsep yang tidak sejalan atau tidak menunjukkan kesepakatan tersebut dibuktikan oleh penelitian Lessmann and Markwardt (2009) yang menyatakan bahwa untuk di negara maju desentralisasi bertolak belakang (berhubungan negatif) atau akan menekan terjadinya korupsi. Sebaliknya, untuk negara yang kurang maju, desentralisasi semakin memperlemah pemberantasan korupsi.

Fishman dan Gatti (2002) menunjukkan bahwa dengan adanya desentralisasi fiskal semakin meningkatkan korupsi. Sedangkan di sisi lain, penelitian Treisman pada tahun 2000 menunjukkan hasil bahwa ada hubungan negatif antara keduanya dengan ditunjukkan koefisien negatif variabel boneka federal terhadap korupsi (Serra, 2006).

Banyak studi empiris yang menyatakan bahwa dengan adanya desentralisasi maka kontrol terhadap korupsi akan lebih baik. Namun bukan berarti dengan desentralisasi maka korupsi akan hilang. Dengan adanya desentralisasi maka korupsi di pusat yang jumlahnya sangat besar akan menurun namun sebaliknya

korupsi di daerah yang jumlahnya kecil;-kecil (*peety corruption*) akan menjadi banyak. Fakta ini sebagaimana yang ditemukan oleh Crook dan Manor pada tahun 2000 (Chene, 2007) yang melakukan penelitian pada desentralisasi yang dilakukan di India, Bangladesh, Ivory Coast, dan Ghana.

Sejak masa reformasi bergulir, dan dilaksanakannya desentralisasi (otonomi daerah) dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah (dan lebih lanjut diganti Undang-Undang Nomor 32 / 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 / 2014), banyak pejabat daerah yang tersangkut kasus korupsi. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, dari tahun 2004 hingga awal tahun 2015 terdapat 343 kepala daerah yang harus menghadapi proses hukum baik di kejaksaan, kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat perkara korupsi, yang sebagian besar karena tersangkut masalah pengelolaan keuangan daerah (*Kompas*, 4 Februari 2015). Sebagian dari mereka, seperti Ratu Atut Chosiyah (Gubernur Banten), Syamsul Arifin (Gubernur Sumatera Utara), Awang Faruk Ishak (Gubernur Kaltim), Agusrin Najamudin (Gubernur Bengkulu), Fuad Amin (Bupati Bangkalan), Hendi Bundoro dan Siti Nurmarkesi (Bupati Kendal), Rina Iriani (Bupati Karanganyar), dan Amran Batalipu (Bupati Buol), harus mendekam di penjara. Fakta ini menunjukkan bahwa desentralisasi dapat memiliki konsekuensi yang ambigu: pada satu sisi memungkinkan daerah untuk lebih memiliki kewenangan sehingga flexible dan responsif dalam melakukan pelayanan publik; tapi pada sisi lain, juga menyebabkan para pejabatnya lebih memiliki kesempatan untuk korup. Korupsi oleh pejabat terpilih dan pegawai publik dapat menjadi sumber utama ketidakpuasan publik terhadap pemerintah daerah. Ketika pejabat mengkorup uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau meminta uang dari individu atau perusahaan yang berbisnis dengan atau diatur oleh pemerintah daerah, maka akan terjadi kenaikan biaya pemerintah, peraturan yang tak dijalankan, dan secara umum mereduksi kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Akhirnya, korupsi menghancurkan harapan pelayanan publik yang baik sebagai tujuan desentralisasi itu sendiri. Indonesia *Corruption Watch* (ICW) menyebutkan bahwa korupsi di daerah telah menyebabkan buruknya kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan, transportasi dan kesehatan. Maraknya korupsi di level lokal ini sejalan

dengan kondisi serupa di level nasional. Indikasi maraknya praktek korupsi di Indonesia dapat dilihat dari angka persepsi korupsi, misalnya hasil studi yang dilakukan *Transparency International*. Secara global, dalam sepuluh tahun terakhir, survei *Transparency International* (TI) menempatkan Indonesia masuk dalam kelompok negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi. Dari *Corruption Perception Index* (CPI) untuk skor 10 (terbersih) hingga skor 0 (terkorup), Indonesia sejak tahun 2001 hingga 2010 selalu dibawah skor 3,0 atau masih tergolong negara sangat korup. Baru pada tahun 2012 tren positif kenaikan skor CPI mulai terlihat. Terbukti dengan perolehan skor Indonesia naik menjadi 32. Pada survey *Transparency International* yang terbaru tahun 2015, Indonesia kembali mendapatkan kenaikan skor CPI, yaitu 3,6.

PDRB dan Korupsi

Literatur teoretis membuat prediksi yang ambigu tentang hubungan antara korupsi dan dampaknya terhadap kegiatan ekonomi. Pandangan pertama disebut sebagai hipotesis grease yang efisien berpendapat bahwa korupsi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena bertindak sebagai uang pelumas, yang memungkinkan perusahaan untuk menghindari birokrasi. Lui (1985) dalam mendukung pandangan ini menunjukkan bahwa dalam Model antrian korupsi dapat meningkatkan pertumbuhan. Dalam hal ini perbedaan ukuran suap oleh perusahaan yang berbeda dapat mencerminkan biaya peluang yang berbeda sehubungan dengan birokrasi menunda, jadi membeli kaset merah yang lebih rendah dapat meningkatkan efisiensi.

Sebaliknya pandangan kedua menolak anggapan bahwa korupsi bisa menjadi efisiensi meningkatkan. Asumsi penting dari model grease efisien adalah bahwa birokrasi dan peraturan beban dapat diambil sebagai eksogen, terlepas dari insentif bagi pejabat untuk menerima suap. Itu pandangan sebaliknya menegaskan bahwa karena para birokrat memiliki kekuasaan diskresi dengan memberi regulasi, beban regulasi dapat diatur secara endogen oleh pejabat korup sehingga mereka menyesuaikan sifat dan jumlah pelecehan pada perusahaan untuk mendapatkan suap maksimum yang mungkin (Shleifer dan Vishny (1993 dan 1994), Kaufman dan Wei (1999)). Dalam model ini perusahaan yang membayar lebih banyak suap

masih bisa menghadapi birokrasi yang lebih tinggi, tidak efektif. Akibatnya, korupsi bisa lebih rendah efisiensi ekonomi bukan meningkatkannya.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan korupsi pertama kali dipelajari oleh Mauro (1995). Data penelitian menunjukkan Bisnis Internasional (BI) untuk 70 negara untuk periode tersebut 1980-1983. Penelitiannya menemukan hubungan negatif yang signifikan antara korupsi dan rata-rata tahunan tingkat pertumbuhan ekonomi selama periode 1960-1985 dan juga antara korupsi dan investasi PDRB perbandingan untuk 1960-1985 dan untuk 1980-1985 juga.

Stabilitas Politik dan Korupsi

Aleksandra (2000) menemukan bahwa stabilitas merupakan prasyarat penting untuk mitigasi korupsi yang sukses. Kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil memungkinkan pemerintah dan warga negara untuk mempromosikan mekanisme transparan dalam pemantauan, penilaian dan pengendalian korupsi. Aleksandra juga menunjukkan bahwa korupsi merajalela di negaranegara di Eropa Tenggara yang mengalami transisi politik. Sering kali transisi ini disertai dengan ketidakstabilan politik, ekonomi dan sosial. Ketidakstabilan ini dapat membuat korupsi menjadi satu-satunya pilihan yang tersedia untuk warga negara, termasuk pejabat pemerintah untuk bertahan hidup. Berdasarkan penelitian tersebut, stabilitas politik dapat memiliki hubungan yang negatif dengan tingkat korupsi.

Para peneliti sebelumnya secara intuitif mengategorikan stabilitas politik sebagai pola umum negara-negara dengan tingkat korupsi yang rendah; namun bukti-bukti empiris tentang masalah ini jarang. Studi ini menawarkan analisis empiris baru untuk memahami dampak stabilitas politik terhadap korupsi. Sebuah hipotesis penelitian dirumuskan, dengan menyatakan dampak positif yang kuat dari stabilitas politik terhadap korupsi.

Ketidakstabilan politik negara (terutama negara berkembang) sangat kuat mempengaruhi tingkat korupsi (Waterbury, 1976). Para peneliti mempertimbangkan kasus-kasus seperti Maroko atau Mesir. Asumsi-asumsi ini didasarkan pada korupsi atau independen dari stabilitas politik, bahwa ada yang menunjukkan jika negara-negara dengan rotasi kekuasaan politik yang sering (dari

satu partai ke partai lain) dapat memberikan administrasi publik yang kurang mapan sehingga mendorong tingkat korupsi yang lebih tinggi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Asiedu (2008)	<i>Organizational Commitment and Citizenship Behavior: Tools to improve employee Performance; An Internal Marketing Approach.</i>	Efek korupsi bervariasi secara signifikan di seluruh wilayah, korupsi memiliki efek buruk pada pertumbuhan investasi bagi negara-negara transisi, namun tidak berpengaruh signifikan untuk Amerika Latin, Karibia, dan Sub-Sahara Afrika. Selanjutnya, diantara variabel termasuk dalam regresi (ukuran perusahaan, kepemilikan perusahaan, orientasi perdagangan, industri, PDB, inflasi dan keterbukaan ekonomi) korupsi adalah penentu paling penting dari pertumbuhan investasi bagi negara-negara transisi.
2	Musila dan Sigie (2006)	<i>Accelerating foreign direct investment flow to Africa: from policy statment to succesfull strategies.</i>	Aliran investasi asing langsung ke Afrika tergantung pada keadaan negara-negara di dalamnya sendiri. Jika program perkembangan Afrika (NEPAD) berhasil dilakukan, aliran investasi asing langsung ke Afrika pun akan meningkat. Faktor-faktor yang menjadi ukuran penilaian kualitas pemerintah di Afrika adalah keterbukaan ekonomi, stabilitas politik, tingkat korupsi, serta kestabilan ekonomi makro.
3	Honig (2006)	<i>The Role of Social and Human Capital among Nascent Entrepreneur.</i>	Perubahan pada institusi pemerintahan menurunkan penarikan modal keluar. Kualitas pemerintahan merupakan faktor

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			penentu yang signifikan terhadap tingkat aliran modal masuk. Transparansi, tingkat korupsi yang rendah, tingkat pengawasan dan hukum yang kuat mendorong berkurangnya potensi terjadinya krisis. Penilaian kualitas pemerintahan menggunakan tiga faktor yaitu kualitas birokrasi, korupsi, dan stabilitas politik.
4	Giri Jasankar Malik, Shrabani Saha (2016)	<i>Corruption And Economic Development: New Evidence From The Middle Eastern And African Countries. Journal Economic Analysis dan Policy,</i>	Ada hubungan kubik antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat korupsi dimana tingkat korupsi di negara-negara yang korup dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, namun pada negara tingkat menengah korupsi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pada tingkat yang lebih tinggi secara substansial akan mengurangi pertumbuhan ekonomi. Hubungan kubik antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat korupsi merupakan hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi.
5	Srinawatmi (2016)	<i>Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi</i>	Indeks persepsi korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, korupsi bukan sebagai pelicin roda perekonomian di 12 negara asia pasifik begitupun dengan investasi asing langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

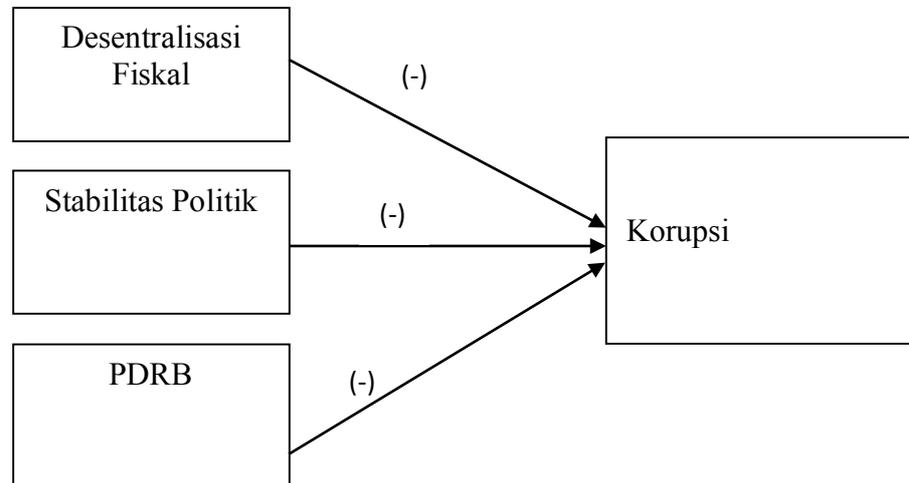
2.3 Kerangka Pemikiran

Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya (Poerwadarminta, 1982). Banyak faktor penyebab tingginya kasus tindak kejahatan korupsi, salah satunya adanya faktor ekonomi. Penelitian

yang dilakukan oleh Rinaldi (2007) dan Saputra (2012) menemukan bahwa desentralisasi fiskal membawa implikasi pada terjadinya perpindahan relasi kekuasaan dari pusat ke daerah dan antar lembaga di daerah. Perpindahan kuasa fiskal dari pusat ke daerah menyebabkan pengelolaan sumber pendapatan daerah dan keuangan daerah, seutuhnya dikelola oleh daerah itu sendiri. Hal ini yang dapat dijadikan kesempatan serta penyebab timbulnya tindak kejahatan korupsi di daerah. Maka dari itu desentralisasi diduga berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi.

Selain itu kondisi stabilitas politik juga menjadi salah satu faktor terjadinya tingkat korupsi. Stabilnya kondisi politik pada suatu negara atau daerah dapat menekan adanya tingkat korupsi karena semua dapat dikendalikan dan diawasi dengan baik oleh regulator atau pemerintah. Tetapi jika stabilitas politik ditinjau dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), perspektif tersebut dilihat dari partisipasi masyarakat dalam bidang berpolitik. Menurut Alkostar (2009), sebagian besar tindak kejahatan korupsi diawali dengan adanya keikutsertaan masyarakat dalam organisasi politik untuk dapat menduduki jabatan atau wewenang tertentu. Jadi semakin banyak partisipasi politik maka akan meningkatkan nilai IDI dimana hal ini diduga berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi.

Faktor pendapatan masih menjadi perdebatan dalam beberapa penelitian yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pendapatan dan tingkat korupsi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Waluyo (2010) yang menyatakan terdapat hubungan antara tingkat pendapatan yang diukur dari pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat korupsi. Tingkat pendapatan yang tinggi akan menurunkan niat seseorang atau kelompok dalam melakukan tindak kejahatan korupsi. Maka dari itu diduga terdapat pengaruh yang negatif antara PDRB dan tingkat korupsi.



Gambar 2.1 Kerangka Teoritis

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori dan penelitian empiris, maka dapat diusulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Diduga desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap korupsi yang diukur dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia.
2. Diduga stabilitas politik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap korupsi yang diukur dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia.
3. Diduga PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap korupsi yang diukur dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia.
4. Diduga desentralisasi fiskal, stabilitas politik, dan PDRB berpengaruh secara bersama-sama terhadap korupsi yang diukur dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini bersifat kuantitatif dan data yang digunakan dalam jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah diolah dan diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas yaitu desentralisasi fiskal, stabilitas politik, PDRB. serta satu variabel terikat yaitu korupsi. Dalam penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Tabel 3.1 Deskripsi Data

Variabel	Simbol	Proksi	Satuan Pengukuran	Sumber Data
Korupsi	IPK	Indeks Persepsi Korupsi	Persen	Transparansi Internasional
Desentralisasi Fiskal	DF	Indeks Desentralisasi	Persen	Badan Pusat Statistik
Stabilitas Politik	SP	Indeks Demokrasi Indonesia	Persen	Badan Pusat Statistik
Produk Domestik Regional Bruto	PDRB	Pertumbuhan PDRB	Persen	Badan Pusat Statistik

3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan, secara teoritis, variabel penelitian dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau objek dengan objek yang lain (Sangadji dan Sopiha, 2010), adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

sebagai berikut:

1. Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Korupsi

Pada penelitian ini variabel korupsi diproksikan dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Menurut *Transparency International* (1995), IPK adalah hasil pengukuran survei persepsi korupsi yang dilakukan *Transparency International* Indonesia di kabupaten/kota di Indonesia. Analisis data untuk menentukan indeks persepsi korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah, dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani. Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan atau penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Berikut adalah nilai persepsi korupsi:

Tabel 3.1 Nilai Persepsi Korupsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval IPK	Hasil Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,75	25 - 43,75	D	Tidak bersih dari korupsi
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang bersih dari korupsi
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Cukup bersih dari korupsi
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	Bersih dari korupsi

Sumber: Transparansi Internasional (2016)

Data penelitian yang digunakan merupakan data hasil survei yang dilakukan oleh Transparansi Internasional dan telah dipublikasikan pada laman resmi dengan satuan indeks.

2. Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

Desentralisasi Fiskal

Pada penelitian ini desentralisasi fiskal diproksikan dengan tingkat kemandirian kabupaten/kota dengan satuan persen. Tingkat Kemandirian Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah tingkat kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rasio PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD-nya secara nyata, mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal. Menurut BPS (2020) jika tingkat kemandirian suatu daerah “rendah sekali” (0-25 %), dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat memiliki peranan yang dominan dari pada pemerintah daerah itu sendiri. Sedangkan jika suatu daerah memiliki tingkat kemandirian “rendah” (>25-50 %), campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Kategori “sedang” (>50-75 %), menggambarkan daerah yang sudah mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah, sedangkan kategori “tinggi” (>75%), bisa diartikan bahwa pemerintah daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya. Berikut adalah rumusan dalam menghitung tingkat kemandirian kabupaten/kota:

$$Y = \frac{PAD}{APBD} \times 100\%$$

Dimana:

Y = Tingkat kemandirian daerah

PAD = Pendapatan Asli Daerah

APBD = Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Stabilitas Politik

Pada penelitian ini variabel stabilitas politik diproksikan dengan IDI (Indeks Demokrasi Indonesia). Menurut BPS (2020) IDI adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di provinsi. Indeks ini menilai tiga aspek dalam demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan institusi demokrasi yang diharapkan berguna untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan praktik-praktik demokrasi selama

ini. Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) *review* surat kabar lokal, (2) *review* dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60–80), dan “buruk” (indeks < 60)

Secara umum, IDI mengadopsi ukuran demokrasi yang dibuat oleh Freedom House yang kemudian dilokalkan dengan konteks Indonesia dan tetap mempertahankan konsep demokrasi itu sendiri. Pada penelitian ini menggunakan data IDI yang telah dipublikasikan di BPS dengan satuan persen.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk domestik regional bruto adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi diwilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan (BPS, 2019). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laju pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan tahun dasar 2010 dari 18 provinsi di kawasan barat Indonesia selama periode 2015-2019 diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam satuan persen.

$$LPPDRB = \frac{PDRBt - PDRBt - 1}{PDRBt - 1} \times 100\%$$

Dimana:

LPPDRB = Laju pertumbuhan PDRB

PDRBt = Pendapatan Domestik Regional Bruto tahun t

PDRBt-1 = Pendapatan Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya

3.3 Wilayah Penelitian

Wilayah yang menjadi fokus penelitian adalah di wilayah bagian barat Indonesia dengan berdasarkan rekomendasi dari Badan Pusat Statistik. Peneliti menggunakan data sekunder yang terbentuk pada periode 2015-2019 yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas (*independent variabel*) terhadap variabel terikat (*dependent variabel*)

3.4 Model dan Metode Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode data panel (*panel data*) dengan menggunakan bantuan alat analisis *E-views 9*.

3.4.1 Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas diperlukan untuk mengetahui kenormalan *error term* dan variabel-variabel (independen dan dependen variabel), apakah data sudah tersebar secara normal ataukah belum. Regresi linear normal klasik mengasumsikan bahwa distribusi probabilitas dari gangguan residual memiliki rata-rata yang diharapkan sama dengan nol, tidak berkorelasi dan mempunyai varian yang konstan. Metode yang digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi residual antara lain Jarque-Bera *Test* (*JB-Test*) dan metode grafik. Dalam metode *J-B Test*, yang dilakukan adalah menghitung nilai *skewness* dan *kurtosis* (Gujarati, 2010).

Hipotesis:

Ho : data tersebar normal

Ha : data tidak tersebar normal

Kriteria Pengujian:

Ho ditolak dan Ha diterima, jika $J-B > \text{Chi-Square}$

Ho diterima dan Ha ditolak, jika $J-B < \text{Chi-Square}$

Uji Multikolinieritas

Menurut Gujarati (2004), multikolinieritas adalah hubungan linier yang terjadi diantara variabel-variabel independen. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya masalah korelasi yang sempurna antar variabel bebasnya. Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan regresi *Auxiliary*, yaitu dengan membandingkan koefisien determinasi parsial (r^2) dengan koefisien determinasi majemuk (R^2). Dalam hal ini, hipotesis pendugaan masalah multikolinieritas sebagai berikut:

Ho : $R^2 < r^2$, model terdapat masalah multikolinieritas

Ha : $R^2 > r^2$, model terbebas dari masalah multikolinieritas

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan salah satu penyimpangan terhadap asumsi kesamaan varians (homoskedastisitas) yang tidak konstan, yaitu varians error bernilai sama untuk setiap kombinasi tetap dari X_1, X_2, \dots, X_p . Jika asumsi ini tidak dipenuhi maka dugaan OLS tidak lagi bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Adanya heteroskedastisitas ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$E(e_i) = \sigma^2 \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Untuk uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Metode White dengan hipotesis pengambilan keputusan sebagai berikut:

H_0 : Nilai Prob $< \alpha$ (0,05) = Terjadi gejala Heteroskedastisitas

H_a : Nilai Prob $> \alpha$ (0,05) = Tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi berkaitan dengan pengaruh observer atau data dalam satu variabel yang saling berhubungan satu sama lain. Besaran nilai sebuah data dapat saja dipengaruhi atau berhubungan dengan data lainnya (atau data sebelumnya). Pada Uji Autokorelasi untuk penelitian ini menggunakan uji *Durbin Watson* (DW Test) dengan kriteria sebagai berikut:

$0 < d < d_L$ = Menolak hipotesis nol; ada autokorelasi positif

$d_L < d < d_U$ = Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan

$d_U < d < 4 - d_U$ = Gagal menolak hipotesis nol; tidak ada autokorelasi

$4 - d_U < d < 4 - d_L$ = Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan

$4 - d_L < d < 4$ = Menolak hipotesis nol; ada autokorelasi negatif

3.4.2 Regresi Data Panel

Keunggulan regresi data panel menurut Wibisono (2005) antara lain:

- a. Panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu
- b. Kemampuan mengontrol heterogenitas ini selanjutnya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku lebih kompleks.

- c. Data panel mendasar diri pada observasi *cross-section* yang berulang-ulang (*time series*), sehingga metode data panel cocok digunakan sebagai study of dynamic adjustment.
- d. Tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informative, lebih variatif, dan kolinieritas (multikolinieritas) antara data semakin berkurang, dan derajat kebebasan (*degree of freedom/df*) lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien.
- e. Data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks.
- f. Data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Dengan keunggulan tersebut maka implikasi pada tidak harus dilakukannya pengujian asumsi klasik dalam model data panel (Gujarti, 2006). Ada beberapa model regresi data panel, salah satunya adalah model dengan *slope* konstan dan *intercept* bervariasi. Model regresi data panel yang hanya dipengaruhi oleh salah satu unit saja (unit *cross-sectional* atau unit waktu) disebut model komponen satu arah, sedangkan model regresi data panel yang dipengaruhi oleh kedua unit (unit *cross-sectional* dan unit waktu) disebut model komponen dua arah. Secara umum terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam menduga model dari data panel yaitu model tanpa pengaruh individu (*common effect*) dan model dengan pengaruh individu (*fixed effect* dan *random effect*) dalam buku Agus Widarjono (2016).

Analisis regresi data panel adalah analisis yang didasarkan pada data panel untuk mengamati hubungan antar satu variabel terikat dengan satu variabel bebas. Ada tiga pendekatan dalam regresi data panel (Agus Widarjono, 2016).

a. Common Effect Model (CEM)

Common Effect Model adalah pendugaan yang menggabungkan (*pooled*) seluruh data *time series* dan *cross section* dan menggunakan pendekatan OLS (*Ordinary Least Square*) untuk menduga parameterunya. Metode OLS merupakan salah satu metode populer untuk menduga nilai parameter dalam persamaan regresi linear. Secara umum, persamaan modelnya dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dengan:

Y_{it} = Variabel respon pada unit observasi ke- i dan waktu ke- t

X_{it} = Variabel prediktor pada unit observasi ke- i dan waktu ke- t

β = Koefisien *slope* atau koefisien arah

α = *Intercept* model regresi

ε_{it} = Galat atau komponen *error* pada unit observasi ke- i dan waktu ke- t

b. *Fixed Effect Model (FEM)*

Teknik model *Fixed Effect* adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel *dummy* untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Pengertian *Fixed Effect* ini didasarkan adanya perbedaan intersep antara individu namun intersepanya sama antar waktu (*time in variant*). Disamping itu, model ini juga mengansumsikan bahwa koefisien regresi (*slope*) tetap antar individu dan antar waktu. Pendekatan dengan variabel *dummy* ini dikenal dengan sebutan *Fixed Effect Model* atau *Least Square Dummy Variabel (LSDV)* atau disebut juga *Covariance Model*. Persamaan pada estimasi dengan menggunakan *Fixed Effect Model* dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_i + \sum_{K=2}^N a_k D_{ki} + \beta X_{it} + \varepsilon_{it}$$

c. *Random Effect Model (REM)*

Bila pada *Fixed Effect Model* perbedaan karakteristik-karakteristik individu dan waktu diakomodasikan pada *intercept* sehingga *intercept*-nya berubah antar waktu. Sementara Model *Random Effect Model* perbedaan karakteristik individu dan waktu diakomodasikan pada *error* dari model. Mengingat ada dua komponen yang mempunyai kontribusi pada pembentukan *error*, yaitu individu dan waktu, maka *random error* pada REM juga perlu diurai menjadi *error* untuk komponen waktu dan *error* gabungan. Teknik ini juga memperhitungkan bahwa *error* mungkin berkorelasi sepanjang *time series* dan *cross section*. Dengan demikian persamaan REM diformulasikan sebagai berikut.

$$Y_n = \alpha + \beta X_{it} + \varepsilon_{it} ,$$

dengan $\varepsilon_{it} = u_i + v_t + w_{it}$

Dimana:

u_i = Komponen *error cross section*

v_t = Komponen *error time series*

w_{it} = Komponen *error gabungan*

3.4.3 Pemilihan Model Regresi Estimasi Data Panel

a. Uji Chow

Uji ini digunakan untuk memilih salah satu model pada regresi data panel, yaitu antara model efek tetap (*fixed effect model*) dengan model koefisien tetap (*common effect model*). Hipotesis pengujiannya sebagai berikut:

$H_0 = \alpha_i = 0; i = 1, 2, \dots, n$ (*Common Effect Model*)

$H_1 = \alpha_i \neq 0; i = 1, 2, \dots, n$ (*Fixed Effect Model*)

b. Uji Hausman

Uji ini digunakan untuk memilih model efek acak (*random effect model*) dengan model efek tetap (*fixed effect model*). Uji ini bekerja dengan menguji apakah terdapat hubungan antara galat pada model (galat komposit) dengan satu atau lebih variabel penjelas (independen) dalam model. Hipotesis pengujiannya sebagai berikut:

H_0 = Metode *Random Effect*

H_1 = Metode *Fixed Effect*

Dengan rumus sebagai berikut

$$m = (\beta - b)(M_0 - M_1)^{-1}(\beta - b) \sim X^2(K)$$

Dimana β adalah vektor untuk statistik variabel *fixed effect*, b adalah *vector statistic* variabel *random effect*, M_0 adalah matrik kovarians untuk dugaan *fixed effect* model dan M_1 adalah matrik kovarians untuk dugaan *random effect* model.

c. Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier (LM) adalah uji untuk mengetahui apakah model *Random Effect* atau model *Common Effect* (OLS) yang paling tepat digunakan. Uji signifikansi *Random Effect* ini dikembangkan oleh Breusch Pagan. Metode Breusch

Pagan untuk uji signifikansi *Random Effect* didasarkan pada nilai residual dari metode OLS. Hipotesis pengujiannya adalah sebagai berikut:

$H_0 = \text{Common Effect Model}$

$H_1 = \text{Random Effect Model}$

3.4.4 Pengujian Hipotesis

a. Uji t

Uji t statistik melihat hubungan atau pengaruh antara variabel independen, secara individual terhadap variabel dependen (parsial) (Widarjono, 2016).

Hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. $H_0: \beta_1 \geq 0$: Ada pengaruh positif antara desentralisasi fiskal terhadap korupsi.
 $H_a: \beta_1 < 0$: Ada pengaruh negatif antara variabel desentralisasi fiskal terhadap korupsi.
2. $H_0: \beta_2 \geq 0$: Ada pengaruh positif antara variabel stabilitas politik terhadap korupsi.
 $H_a: \beta_2 < 0$: Ada pengaruh negatif variabel stabilitas politik terhadap korupsi.
3. $H_0: \beta_3 \geq 0$: Ada pengaruh positif antara variabel PDRB terhadap korupsi.
 $H_a: \beta_3 < 0$: Ada pengaruh negatif antara variabel PDRB terhadap korupsi.

Kriteria pengujiannya adalah:

- a. Jika nilai t-statistik > nilai t-tabel maka H_0 ditolak dan menerima H_a
- b. Jika t-statistik < nilai t-tabel maka H_0 diterima

Jika H_0 ditolak, berarti variabel bebas yang diuji berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Jika H_0 diterima berarti variabel bebas yang diuji tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.

b. Uji F Statistik

Pengujian ini akan memperlihatkan hubungan atau pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Widarjono, 2016).

Hipotesis dari penelitian ini:

1. $H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 0$, artinya variabel desentralisasi fiskal, stabilitas politik, dan PDRB secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap korupsi.
 $H_a : \alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \alpha_3 \neq \alpha_4 \neq 0$, artinya variabel desentralisasi fiskal, stabilitas politik, dan PDRB secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap korupsi.

Kriteria pengujiannya adalah:

- a. H_0 ditolak jika nilai $F_{hitung} >$ nilai F_{tabel} , yang berarti secara bersama sama, atau salah satu dari variabel independen mempengaruhi dan signifikan terhadap variabel dependen
- b. H_0 diterima jika nilai $F_{hitung} <$ nilai F_{tabel} , yang berarti secara bersama sama, atau salah satu dari variabel independen tidak mempengaruhi dan tidak signifikan terhadap variabel dependen.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi (R^2) merupakan suatu ukuran yang penting dalam analisis regresi linear, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang diestimasi. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 dikategorikan kedalam dua hal yaitu jika nilai R^2 semakin besar (mendekati nilai 1) maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lebih besar. Begitu pula sebaliknya jika nilai R^2 semakin kecil (mendekati nilai 0) maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin kecil. Sehingga besaran nilai R^2 berada antara 0 sampai 1 atau $0 < R^2 < 1$.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil regresi dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di 18 provinsi bagian barat Indonesia pada tahun 2015-2019.
2. Stabilitas politik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di 18 provinsi bagian barat Indonesia pada tahun 2015-2019.
3. Pertumbuhan PDRB berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di 18 provinsi bagian barat Indonesia pada tahun 2015-2019.
4. Desentralisasi fiskal, stabilitas politik, dan pertumbuhan PDRB secara bersama-sama berpengaruh terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di 18 provinsi bagian barat Indonesia pada tahun 2015-2019.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan menjadi sesuatu yang memiliki eksternalitas negatif jika tidak dilakukan pengawasan secara sistematis dan terstruktur. Peningkatan PAD mempunyai indikasi adanya peningkatan aliran keuangan di daerah yang akan semakin memperburuk persepsi publik terhadap korupsi pada pejabat publik di daerah. Hal tersebut akan berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi yang akan merugikan daerah dan masyarakat. Peningkatan keterbukaan publik atau daerah dengan adanya penerapan GCG (*Good Corporate Government*) merupakan salah satu

kebijakan yang dapat memperbaiki persepsi masyarakat terhadap korupsi. *E-Government* dengan penyampaian secara terbuka terkait keuangan daerah, harus dapat diakses dan distribusikan kepada masyarakat sampai ke pelosok daerah agar terjadinya perbaikan pada persepsi korupsi oleh pejabat publik.

2. Masyarakat pada umumnya mempunyai hak berpolitik yang sama dan kecenderungan hak berpolitik hanya digunakan sebagai sarana mencapai kedudukan dan jabatan tertentu. Seharunya sebelum masyarakat memperoleh hak politik harus diberikan edukasi yang lebih dan dijelaskan terkait “*reward and punishment*” jika hak tersebut digunakan secara baik ataupun disalahgunakan. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan pada bidang politik saja tetapi akan berdampak pada bidang ekonomi yang menyebabkan ketidaktepatan penggunaan sejumlah dana dalam pengalokasiannya.
3. Faktor pendapatan pada penelitian ini bukanlah hal yang signifikan dalam pengaruhnya terhadap tingkat korupsi. Pendapatan yang besar tidak mengurangi adanya niatan seseorang atau kelompok dalam melakukan kejahatan korupsi. Maka dari itu, diperlukan adanya kerjasama dan tindakan saling mengawasi dari *stake holder* dan *share holder* dalam rangka untuk mengurangi tindak kejahatan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiedu, Michael; Sarfo. Jacob Owusu; Adjei, Adjei. February 2014. *Organizational Commitment and Citizenship Behavior: Tools to improve employee Performance; An Internal Marketing Approach*. European Scientific Journal February 2014 edition vol.10, No.4 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431.
- Aleksandra, F. 2000. “*Stability and Corruption in South Eastern Europe: Corruption is a Way of Life in South-Eastern Europe a Necessary Method of Survival*”. South-East Europe Review.
- Azfar, Omar, et all., *Decentralization and Public Services: The Impact of institutional Arrangements*, IRIS Paper, (University Maryland, USA, 1999).
- Bird, Richard, M. dan Francois Vaillancourt, 1998, *Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang: Tinjauan Umum*, dalam Richard Bird dan Francois Vailancourt, (Eds), *Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Campante, F. R., Chor, D. & Do, Q.-A., 2009. Instability and the Incentives for Corruption. *Economics & Politics*, 21(1), pp. 42-92.
- Churchill, Ransford Q, Agbodohu W, Arhenful. P. 2013.”*Determin Factors Affecting Corruption: A Cross Country Analysis*”. International ournal of Economics, Business, and Finance, Vol 1, No. 10, November 2013, pp : 275-258.
- Caporaso, J. A. Levine, D. P. 1992. *Theories of Political Economy*. Cambridge University Press.
- Fisman, R. Gatti, R. 2002. “*Decentralization and Corruption: Evidence Across Countries*”. *Journal of Public Economics*, 83:325–345.
- Gurgur, Tugrul. Anwar, Shah. 2005. “*Localization and corruption: Panacea or Pandora's Box?*”. World Bank Policy Research Working Paper 3486.
- Isjwara, F., *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung : Bina Cipta, 1986), cet. VII.
- Knack, S., and Keefer, P. 1996. ‘*Institutions and Economic Performance*’, *Economics and Politics*, 7, pp. 207-227, 1996.

- Faisal Lutfi, Akhmad. Diartho, Herman Cahyo. 2020.”*Dampak Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 4 Negara di ASEAN*”. e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2020, Volume VII (1) : 30-35.
- Maria dkk. 2019.” *Desentralisasi Fiskal dan Probabilitas Terjadinya Korupsi: Sebuah Bukti Empiris dari Indonesia*”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 22 No. 1 April 2019, 1 – 22.
- Mauro, Paolo.”The Persistence of Corruption and Slow Economic Growth.” IMF Staff Paper No. 51 No. 1, Washington DC, 2004.
- Paldam M. 2002. “*The Cross-Country Pattern of Corruption: Economics, Culture and the Seesaw Dynamics*”.European Journal of Political Economy, 18(2):215 {240. 22}.
- Pujiati, Amin. 2006. Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 61-70.
- Plano, Jack A., *Kamus Analisa Politik*, terj. : Edi S. Siregar, (Jakarta : Rajawali Press,1985).
- Rinaldi, Taufik, Marini Purnomo dan Dewi Damayanti (2007). *Memerangi Korupsi Yang Terdesentralisasi: Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintahan Daerah*”. *Bank Dunia: JusticeProject*.
- Sanit. Arbi, *Sistem Politik Indonesia; Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, (Jakarta : Rajawali Press, 1982).
- Saragih, J.P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Silaen, Friska Yuana. Sasana, Hadi. 2013.”*Analisis Determinan Korupsi di Era Otonomi Daerah di Indonesia (Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah)*”. Diponegoro Journal of Economics. Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013, Halaman 1-6.
- Sukirno, Sadono. 2011. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Suriasumantri, Jujun S., *Ilmu dalam Perspektif Moral. Sosial dan Politik : Sebuah Dialog tentang Keilmuan Dewasa Ini*, (Jakarta:Gramedia, 1986), him. 61-62. Lihatpula Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Konteks ke-Indonesiaan*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2004).

- Syafrin, Dzulfian. 2015. *Stabilitas Politik dan Demokrasi Ekonomi di Indonesia*. Diakses dari <https://dzulfiansyafrin.wordpress.com/2015/08/12/stabilitaspolitik-dandemokrasi-ekonomi-di-indonesia/> pada tanggal 10 Januari 2021 jam 22.45.
- Saragih, Juli Panglima. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Saputra, Bambang. 2020. "Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Korupsi di Indonesia". *Jurnal Borneo Administrator* | Volume 8 | No. 3 | 2012.
- Rinaldi, Taufik. 2007. "Memerangi Korupsi di Indonesia yang Terdesentralisasi: Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintahan Daerah". Bank Dunia: Justice for the Poor Project.
- Waluyo, Joko. 2010. "Analisis Hubungan Kausalitas antara Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan: Suatu Studi Lintas Negara". *Buletin Ekonomi* Vol. 8, No. 2, Agustus 2010 hal 70-170.
- Yudistira, Ida Bagus. Jember, I Made. 2015. "Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali". *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol. 4, No. 2, Februari 2015